



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KEUANGAN

INSPEKTORAT JENDERAL
AUDITED TA 2023



#2023
KHP THRIVE

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



**LAPORAN KEUANGAN
AUDITED TAHUN 2023**

INSPEKTORAT JENDERAL

**UNTUK PERIODE
YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

**Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari III Lt. 2,3,4
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3520336, Fax (021) 3513206**

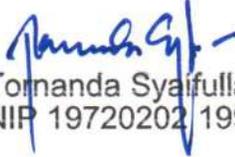
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Inspektorat Jenderal adalah unit Eselon I dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan tahun 2023 *Audited* berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2024
Inspektur Jenderal KKP


Toranda Syaifullah
NIP 19720202 199603 1 003

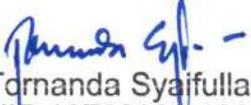
	Hal
KATA PEGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB INSPEKTUR JENDERAL KKP	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
RINGKASAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
II. NERACA	4
III. LAPORAN OPERASIONAL	5
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	7
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	8
A. PENJELASAN UMUM	8
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	17
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	29
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	39
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	45
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	46

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
INSPEKTUR JENDERAL KKP**

Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2024
Inspektur Jenderal KKP


Tormanda Syaifullah
NIP 19720202 199603 1 003

1. Surat Hasil Rekonsiliasi/SHR (Periode 31 Desember 2023)
2. Laporan Keuangan Versi Aplikasi SAKTI Modul GLP
3. Laporan Keuangan Versi MonSAKTI
4. Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)
5. Laporan Pertanggungjawaban BP dan Rekening Koran (Periode 31 Desember 2023)
6. Rekap Pendapatan
7. Rekap Pengembalian Belanja

Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode Tahun 2023 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan – LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp420.555.837,00. Realisasi Belanja Negara TA 2023 adalah sebesar Rp75.393.908.501,00. atau mencapai 99,64 persen terhadap alokasi anggaran sebesar Rp75.666.386.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp5.762.264.041,00. yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp127.199.987,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp5.635.064.054,00; Kewajiban Rp0,00 dan Ekuitas Rp5.762.264.041,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00. sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp75.227.578.474,00 sehingga terdapat

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp75.227.578.474,00). Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional Rp322.752.454,00 dan Pos-Pos Luar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp74.904.826.020,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp5.693.248.380,00 dikurangi dengan Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp74.904.826.020,00). Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas Rp489.017,00. Kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp74.973.352.664,00. Kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar Rp69.015.661,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp5.762.264.041,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahunan 2023 *Audited* disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

INSPEKTORAT JENDERAL KKP LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023			2022		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0.	0.	0	0.	0.	0.
I. Pendapatan Perpajakan	0.	0.	0	0.	0.	0.
1. Pajak Dalam Negeri	0.	0.	0	0.	0.	0.
2. Pajak Perdagangan Internasional	0.	0.	0	0.	0.	0.
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0.	420,555,837.	0	0.	138,586,374.	0.
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0.	0.	0	0.	0.	0.
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0.	0.	0	0.	0.	0.
3. Pendapatan BLU	0.	0.	0	0.	0.	0.
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0.	420,555,837.	0	0.	138,586,374.	0.
III. Pendapatan Hibah	0.	0.	0	0.	0.	0.
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	0.	420,555,837.	0	0.	138,586,374.	0.
B. Belanja Negara	0.	0.	0	0.	0.	0.
I. Belanja Pemerintah Pusat	75,666,386,000.	75,393,908,501.	100	73,801,484,000.	73,623,936,137.	100.
1. Belanja Pegawai	33,995,348,000.	33,738,656,038.	99	34,012,794,000.	33,884,307,837.	100.
2. Belanja Barang	39,513,389,000.	39,498,216,463.	100	35,896,618,000.	35,848,440,699.	100.
3. Belanja Modal	2,157,649,000.	2,157,036,000.	100	3,892,072,000.	3,891,187,601.	100.
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0.	0.	0	0.	0.	0.
5. Belanja Subsidi	0.	0.	0	0.	0.	0.
6. Belanja Hibah	0.	0.	0	0.	0.	0.
7. Belanja Bantuan Sosial	0.	0.	0	0.	0.	0.
8. Belanja Lain-lain	0.	0.	0	0.	0.	0.
Jumlah Belanja Negara	75,666,386,000.	75,393,908,501.	100	73,801,484,000.	73,623,936,137.	100.

**INSPEKTORAT JENDERAL KKP
NERACA
PER 31 Desember 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas Di Bendahara Pengeluaran	0.	0.
Piutang Bukan Pajak	23,878,250	97,803,383
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(119,391)	(489,017)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	23,758,859	97,314,366
Persediaan	103,441,128.	49,923,148
JUMLAH ASET LANCAR	127,199,987	147,237,514
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin	21,801,109,926.	20,172,275,188
AKUMULASI PENYUSUTAN	(16,166,045,872.)	(14,626,264,322)
JUMLAH ASET TETAP	5,635,064,054	5,546,010,866
JUMLAH ASET	5,762,264,041	5,693,248,380
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	5,762,264,041	5,693,248,380
JUMLAH EKUITAS	5,762,264,041	5,693,248,380
JUMLAH EKUITAS	5,762,264,041	5,693,248,380
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,762,264,041	5,693,248,380

III. LAPORAN OPERASIONAL

INSPEKTORAT JENDERAL KKP LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
PENDAPATAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Sumber Daya Alam	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0.	0.	0.	0.
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0.	0.	0.	0.
Jumlah Pendapatan	0.	0.	0.	0.
BEBAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
Beban Pegawai	33,714,777.788.	33,873,373,622.	(158,595,834.)	(0.468)
Beban Persediaan	188,867,667.	164,016,857.	24,850,810.	15.151
Beban Barang dan Jasa	6,454,106,790.	6,952,600,282.	(498,493,492.)	(7,17)
Beban Pemeliharaan	944,169,983.	906,627,280.	37,542,703.	4.141
Beban Perjalanan Dinas	31,857,554,043.	27,722,561,245.	4,134,992,798.	14.916
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0.	0.	0.	0.
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,067,982,812.	1,927,032,528.	140,950,284.	7.314
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	119.391.	489.017.	(369,626).	75.586.
Beban Transfer	0.	0.	0.	0.
Beban Lain-Lain	0.	0.	0.	0.
JUMLAH BEBAN	75,227,578,474.	71,546,700,831.	3,680.887.643.	5.145
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(75,227,578,474.)	(71,546,700,831.)	(3,680,877,643.)	5.145
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	322,567,454.	128,846,000.	193,721,454.	150.351

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	322,567,454.	128,846,000.	193,721,454.	150.351
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0.	0.	0.	0.
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	0.
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	0.
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	185,000.	9,728,458.	(9,543,458.)	(98.098)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	185,000.	10,009,533.	(9,824,533.)	(98.152)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.	281,075.	(281,075.)	(100.)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	322,752,454.	138,574,458.	184,177,996.	132.909
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(74,904,826,020)	(71,408,126,373.)	(3,496,699,647)	4.897
POS LUAR BIASA	0.	0.	0.	0.
Beban Luar Biasa	0.	0.	0.	0.
POS LUAR BIASA	0.	0.	0.	0.
SURPLUS/DEFISIT - LO	(74,904,826,020.)	(71,408,126,373.)	(3,496,699,647)	4.897

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

INSPEKTORAT JENDERAL KKP LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	5,693,248,380.	3,654,497,343.	2,038,751,037.	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(74,904,826,020.)	(71,408,126,373.)	(3,496,699,647.00)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	489,017.	0.	489,017.	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0.	0.	0.	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0.	0.	0.	-
LAIN-LAIN	489,017.	0.	489,017.	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	74,973,352,664.	73,446,877,410.	1,526,475,254.	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	69,015,661.	2,038,751,037.	(1,969,735,376.)	-
EKUITAS AKHIR	5,762,264,041.	5,693,248,380.	69,015,661.	-

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

A.1. Profil Dan Kebijakan Teknis Inspektorat Jenderal KKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern dilingkungan Kementerian Kelautan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan KKP.
- b. Pelaksanaan pengawasan intern dilingkungan KKP terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Kelautan dan Perikanan.
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan dilingkungan KKP.
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Visi :

Terwujudnya KKP yang Berintegritas dan Akuntabel dalam Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumer Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan

Misi :

1. Memberikan pengawasan intern terbaik untuk peningkatan kinerja KKP;
2. Mendorong pengendalian intern yan efektif terhadap sistem dan tata kelola KKP;
3. Mendorong terwujudnya sumber daya manusia aparatur KKP yang berintegritas dan berorientasi pelayanan prima.

Nilai:

Integritas – Profesionalitas – Inovasi

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Makna :

Bangga sebagai Mitra Peningkatan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan menuju Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023 *Audited* secara Komprehensif ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal KKP. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampa dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI Modul GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SAKTI modul Aset Tetap dan SAKTI Modul Persediaan adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Jumlah entitas akuntansi dilingkup Inspektorat Jenderal KKP adalah 1 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA - E1

No	Kode Es I	Uraian	JumlahJenisKewenangan				Jumlah
			KP	KD	DK	TP	
1	02	Inspektorat.Jenderal	1	-	-	-	1
Jumlah			1	-	-	-	1

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Inspektorat Jenderal KKP menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Inspektorat Jenderal KKP dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester Tahun 2023 *Audited* Secara Komperhensif telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal KKP. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal KKP adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA **(1) Pendapatan - LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan - LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan - LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO **(2) Pendapatan - LO**

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja **(3) Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satubulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dana set tetap

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah,
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP),
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Inspektorat Jenderal KKP telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 dari DIPA awal. Sehingga merubah besaran anggaran yaitu dari Rp85.311.317.000,00 menjadi Rp75.666.386.000,00 dengan tabel sebagai berikut:

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	35,305,072,000	33,995,348,000
Belanja Barang	47,848,596,000	39,513,389,000
Belanja Modal	2,157,649,000	2,157,649,000
Jumlah Belanja	85,311,317,000	75,666,386,000

B.1. PENDAPATAN

Realisasi
Pendapatan
Rp420.555.837,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 *Audited* adalah sebesar Rp420.555.837,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

No	Uraian	31 Desember 2023 <i>Audited</i>		
		Estimasi	Realisasi	%
1	Pendapatan dari Penjualan PM	-	322,567,454	0,00
2	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	11,119,215	0,00
3	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	86,869,168	0,00
3	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	0,00
	Jumlah	-	420,555,837	0,00

Realisasi Pendapatan Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 *Audited* disebabkan terdapat Pendapatan dari Penerimaan kembali Belanja Pegawai TAYL, Penerimaan kembali Belanja Barang TAYL dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 2023 Audited dan 2022

No	Uraian	Realisasi	
		2023	2022
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	322,567,454	-
2	Pendapatan Penyelesaian TGR Non Bendahara	-	-
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	11,119,215	9,740,374
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	86,869,168	-
5	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-
6	Pendapatan dari Penjualan PM	-	-
	Jumlah	420,555,837	9,740,374

Pendapatan dari Penerimaan kembali Belanja Pegawai TAYL (425911)

Realisasi Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 *Audited* pada pos pendapatan dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu senilai Rp11.119.215,00

- Setoran SSBP senilai Rp515.495,00 NTPN 3505455DEVMAD0UN tanggal 17 Januari 2023, merupakan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL Tunjangan Khusus bulan Desember.
- Setoran SSBP senilai Rp522.720,00 NTPN AE69B2G4V560OM tanggal 17 Januari 2023, merupakan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL Uang Makan bulan Desember.
- Setoran SSBP senilai Rp9.896.000,00 NTPN B33A061QUQBPKUKI tanggal 20 Februari 2023, merupakan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL Tunjangan Khusus dikarenakan Mutasi.
- Potongan SPM Nomor 490 tanggal 11 September 2023 , SP2D nomer 231751303024728 tanggal 11 September 2023 sebesar Rp185,00, merupakan pengembalian Belanja Pegawai TAYL gaji 13.

Pendapatan dari Penerimaan kembali Belanja Barang TAYL (425912)

Realisasi Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 *Audited* pada pos pendapatan dari penerimaan kembali Belanja Barang tahun anggaran yang lalu senilai Rp86.869.168,00

- Setoran SSBP senilai Rp9.594.000,00 NTPN 1EBB655DEVVA4D3J tanggal 18 April 2023, merupakan penerimaan kembali belanja Barang TAYL berupa ATK.
- Setoran SSBP senilai Rp77.275.168,00 NTPN B49E62G4VG84TB7G tanggal 18 April 2023, merupakan penerimaan kembali belanja Barang TAYL berupa konsumsi kegiatan.

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122)

Realisasi Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 pada pos pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp217.667.455,00.

- Setoran SSBP senilai Rp116.666.666,00 NTPN B4AC37QLUFDHR3HM tanggal 19 Januari 2023, Risalah Lelang nomor 35/26/2023 tanggal 19 Januari 2023 berupa 1 paket Peralatan dan Mesin inventaris kantor (299 Unit).
- Setoran SSBP senilai Rp77.000.789,00 NTPN 48D0909VR05441E tanggal 10 Maret 2023, Risalah Lelang nomor 166/26/2023 tanggal 2 Maret 2023 berupa Barang Bergerak yang terdiri dari 1 Mobil Toyota Kijang Inova.
- Setoran SSBP senilai Rp24.000.000,00 NTPN 48D0909VR05441E tanggal 23 Mei 2023, Risalah Lelang nomor 402/26/2023 tanggal 16 Mei 2023 berupa Barang Bergerak yang terdiri dari 3 Sepeda Motor Honda dan 2 Sepeda Motor Yamaha.
- Setoran SSBP senilai Rp67.500.000,00 NTPN B3D0F3CIFBESSVAL tanggal 2 November 2023, Risalah Lelang nomor 1017/26/2023 tanggal 1 November 2023 berupa 1 Paket Kendaraan bermotor yang terdiri dari 2 unit berupa 1 unit mobil Honda CRV dan 1 unit Sepeda Motor Honda NF 12A1CF MT.
- Setoran SSBP senilai Rp37.399.999,00 NTPN 54ADD2G4VGPPTF54 tanggal 2 Oktober 2023, Risalah Lelang nomor 913/26/2023 tanggal 1 Oktober 2023 berupa peralatan kantor yang terdiri dari Lemari Besi/Metal 1 Unit, Filing Cabinet Besi 109 Unit, Laci Box 7 unit, Whiteborad 1 Unit, Meja Kayu 5 Unit, Kursi Besi/Metal 119 unit.

B.2.BELANJA

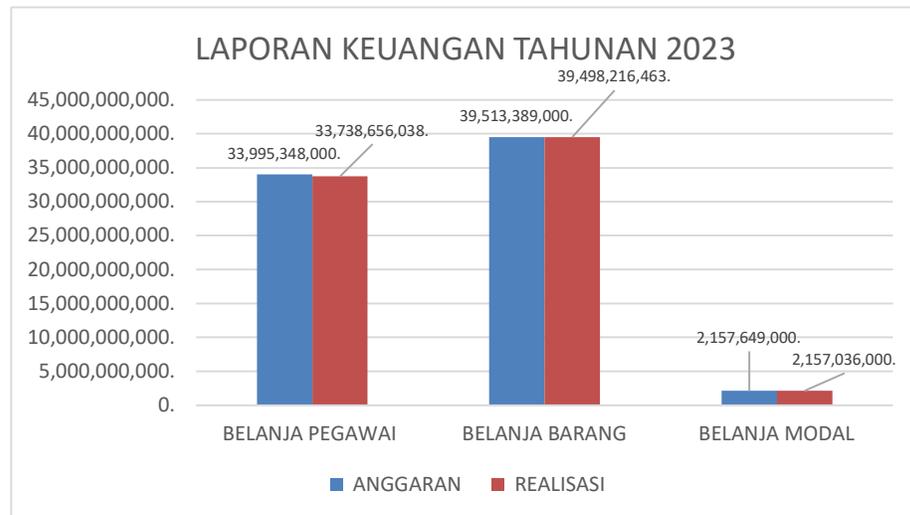
Realisasi Belanja
Rp75.393.908.501,
00

Realisasi Belanja Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 *Audited* sebesar Rp75.393.908.501,00 atau 99.8% dari anggaran belanja sebesar Rp75.666.386.000,00 dengan Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 Audited

Kode Jen. Bel.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	33,995,348,000	33,849,287,738	99.57
52	Belanja Barang	39,513,389,000	39,509,948,735	99.99
53	Belanja Modal	2,157,649,000	2,157,036,000	99.97
	Total Belanja Bruto	75,666,386,000	75,516,272,473	99.80
	Pengembalian Belanja		122,363,972	0.00
	Total Belanja Neto	75,666,386,000	75,393,908,501	99.64

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik ini :



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Belanja Berdasarkan Program Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 Audited

PROGRAM	2023		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	75,666,386,000	75,393,908,501	99.64
Total Belanja	75,666,386,000	75,393,908,501	99.64

Realisasi Belanja Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 mencapai presentase sebesar 99.64%.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2023 Audited dan 2022

Kode Jenis Bel.	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)
		2023	2022	%
51	Belanja Pegawai	33,738,656,038	33,884,307,837	(0.43)
52	Belanja Barang	39,498,216,463	35,848,440,699	10.18
53	Belanja Modal	2,157,036,000	3,891,187,601	(44.57)
	Jumlah	75,393,908,501	73,623,936,137	2.40

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp33.738.656.038,
-*

Realisasi Belanja Pegawai pada Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp33.738.656.038,00 dan Rp33.884.307.837,00. Pegawai di Inspektorat Jenderal periode sampai dengan 31 Desember 2023 berjumlah 205 Orang dengan 554 Jiwa sedangkan Pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berjumlah 6 Orang dengan 11 Jiwa. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai Periode 31 Desember 2023 sebesar Rp33.738.656.038,00 (99,57%) dan Periode 31 Desember 2022 Rp33.884.307.837,00. (99,64%) terjadi Penurunan Presentasi 0,07% dikarenakan pada periode sampai dengan 31 Desember 2023. Terdapat Penurunan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dikarenakan Pegawai

Inspektorat Jenderal ada yang memasuki masa Pensiun, pindah atau mutasi, Izin Cuti diluar tanggungan Pemerintah serta ada pegawai Inspektorat Jenderal yang Meninggal dunia.

Perbandingan Belanja Pegawai Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 Audited dan 2022

No	Uraian	Realisasi Belanja 2023			Realisasi Belanja 2022		
		Belanja	Pengembalian	Belanja Netto	Belanja	Pengembalian	Belanja Netto
1	Belanja Gaji Pokok PNS	10,417,390,400.	3,291,700.	10,414,098,700.000	10,479,818,820.		10,479,818,820.000
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	147,136.	320.	146,816.000	153,065.	1,223.	151,842.000
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	750,512,150.		750,512,150.000	747,911,634.		747,911,634.000
4	Belanja Tunj. Anak PNS	220,141,642.		220,141,642.000	221,770,012.		221,770,012.000
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	280,750,000.	97,020,000.	183,730,000.000	384,650,000.		384,650,000.000
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,802,480,000.	5,415,000.	1,797,065,000.000	1,486,520,000.	4,805,000.	1,481,715,000.000
7	Belanja Tunj. PPh PNS	77,091,971.		77,091,971.000	71,497,743.		71,497,743.000
8	Belanja Tunj. Beras PNS	568,931,520.		568,931,520.000	578,563,380.		578,563,380.000
9	Belanja Uang Makan PNS	945,514,000.		945,514,000.000	1,151,385,000.		1,151,385,000.000
10	Belanja Tunjangan Umum PNS	102,785,000.	3,145,250.	99,639,750.000	128,765,000.		128,765,000.000
11	Belanja Gaji Pokok PPPK	57,826,300.		57,826,300.000			
12	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,540.		1,540.000			
13	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,652,180.		1,652,180.000			
14	Belanja Tunjangan Anak PPPK	211,776.		211,776.000			
15	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8,680,000.		8,680,000.000			
16	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,245,020.		2,245,020.000			
17	Belanja Uang Makan PPPK	11,371,000.		11,371,000.000			
18	Belanja Uang Lembur	65,895,000.		65,895,000.000	13,094,000.		13,094,000.000
19	Belanja Uang Lembur PPPK	1,423,000.		1,423,000.000			
20	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	18,451,010,528.	1,759,430.	18,449,251,098.000	18,624,985,406.		18,624,985,406.000
21	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	83,227,575.		83,227,575.000			
JUMLAH		33,849,287,738.	110,631,700.	33,738,656,038.	33,889,114,060.	4,806,223.	33,884,307,837.

Pengembalian Belanja Pegawai

Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS (511111)

- Pengembalian Belanja Pegawai Bulan Agustus an Nurul Aulia R dari setoran SSBP nomor 7565E1GAB7AU1CEF tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp3.291.700,00.

Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS (511119)

- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 296 tanggal 16 September 2023 , SP2D nomer 231751303014670 tanggal 19 September 2023 sebesar Rp152,00.
- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 747 tanggal 12 Desember 2023 , SP2D nomer 231751303041666 tanggal 13 Desember 2023 sebesar Rp116,00.

- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 749 tanggal 12 Desember 2023 , SP2D nomer 231751303041656 tanggal 13 Desember 2023 sebesar Rp52,00.

Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS (511124)

- Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional an Dony W dari setoran SSBP nomor 5884E2CNR1T9NESO tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp1.287.500,00.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional an M Widodo dari setoran SSBP nomor 5F305395ASFMJT6J tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp1.287.500,00.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional an Putri F dari setoran SSBP nomor D02EB45IQN232U3Q tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp265.000,00.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional an M Widodo tahap II dari setoran SSBP nomor C743E6QRA6S2N2VD tanggal 12 September 2023 sebesar Rp1.287.500,00.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional an Dony W tahap II dari setoran SSBP nomor EDAD48JM9S0ROS8V tanggal 12 September 2023 sebesar Rp1.287.500,00.

Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS (511123)

- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 075 tanggal 3 Maret 2023 , SP2D nomer 231751303003219 tanggal 3 Maret 2023 sebesar Rp82.080.000,00.
- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 079 tanggal 2 Maret 2023 , SP2D nomer 231751303003093 tanggal 3 Maret 2023 sebesar Rp9.540.000,00.
- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 080 tanggal 2 Maret 2023 , SP2D nomer 231751303003094 tanggal 3 Maret 2023 sebesar Rp5.400.000,00.

Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS (511151)

- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 081 tanggal 2 Maret 2023 , SP2D nomer 231751303003095 tanggal 3 Maret 2023 sebesar Rp2.035.250,00.
- Pengembalian Belanja Pegawai dari Potongan SPM Nomor 418 tanggal 18 Agustus 2023 , SP2D nomer 231751303021983 tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp1.110.000,00.

Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus PNS (512411)

- Pengembalian Belanja Pegawai tunjangan Khusus dari setoran NTPN nomer C59D25227457DMBL tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp1.759.430,00.

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp39.498.216.463,
-

Realisasi Belanja Barang Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp39.498.216.463,00 dan Rp35.848.440.699,00 Realisasi belanja barang Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar 99,99%.

Perbandingan Belanja Barang Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 Audited dan 2022

Uraian	Realisasi	
	2023	2022
Belanja Barang Operasional	3,759,804,030	3,647,502,832
Belanja Barang Non Operasional	2,246,330,821	2,922,291,395
Belanja Persediaan	242,385,647	179,782,724
Belanja Jasa	451,728,211	474,325,223
Belanja Pemeliharaan	944,169,983	906,627,280
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	31,614,665,039	27,750,044,230
Belanja Perjalanan Luar Negeri	250,865,004	-
Realisasi Belanja Bruto	39,509,948,735	35,880,573,684
Pengembalian Negara		
- Belanja operasional	303,372	-
-Belanja Bahan	3,007,900	-
- Belanja Jasa Profesi	445,000	4,650,000
- Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	-	
- Belanja Perjalanan Transport luar kota	-	
- Belanja Perjalanan Pkt Meteting DK	450,000	-
- Belanja Perjalanan Biasa	6,706,000	27,482,985
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	770,000	-
- Belanja Perjalanan Pkt Meteting LK	50,000	-
Realisasi Belanja Netto	39,498,216,463	35,848,440,699

Pengembalian Belanja Operasional

Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran (521111)

- Pengembalian Belanja keperluan Perkantoran Void Transaksi KKP an Ismail dari setoran SSBP sebesar Rp303.372,00 nomor NTPN : 1C27945IQN2GT1M0 tanggal 31 Agustus 2023.

Pengembalian Belanja Non Operasional

Pengembalian Belanja Bahan (521211)

- Pengembalian Belanja Bahan double catat komsumsi rapat 8 Agustus 2023 dari setoran SSBP sebesar Rp2.976.400,00 nomor NTPN : DA1961GAB7GM24DR tanggal 9 Oktober 2023.
- Pengembalian Belanja Kelebihan catat pajak kegiatan tanggal 20 februari 2023 dari setoran SSBP sebesar Rp31.500,00 nomor NTPN : B23977NAMJS339VG tanggal 29 Desember 2023.

Pengembalian Belanja Jasa

Pengembalian Belanja Jasa Profesi (522151)

- Pengembalian Belanja Jasa Profesi kelebihan catat pajak kegiatan tanggal 8 Februari dari setoran SSBP sebesar Rp40.000,00 nomor NTPN : B87982CPNKDOL9QU tanggal 29 Desember 2023.
- Pengembalian Belanja Jasa Profesi kelebihan catat pajak kegiatan tanggal 20 Februari 2023 dari setoran SSBP sebesar Rp405.000,00 nomor NTPN : D71B47NAMJS339SM tanggal 29 Desember 2023.

Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa (524111)

- Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa (Kelebihan Pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas an Bina Aji) dari setoran SSBP sebesar Rp360.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 8373245IQMJGGDC6 tanggal 27 Maret 2023.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa (Kelebihan Pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas ke Bogor tanggal 21 sd 23 Juni 2023 an Urip M) dari setoran SSBP sebesar Rp 686.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : B4EF12CNR231KOAK tanggal 9 Oktober 2023.

- Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa (Kelebihan Pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas ke Bogor tanggal 21 sd 23 Juni 2023 an Shinta A) dari setoran SSBP sebesar Rp 686.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 344567N8Q1HCPS4I tanggal 9 Oktober 2023.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa (Kelebihan Pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas ke Bogor tanggal 21 sd 23 Juni 2023 an Prasetya Aris) dari setoran SSBP sebesar Rp 686.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 05C586QRA6V085BR tanggal 9 Oktober 2023.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa (Kelebihan Pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas ke Bandung tanggal 15 sd 18 Mei 2023) dari setoran SSBP sebesar Rp 635.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 81628395ASLRP8T7 tanggal 23 Oktober 2023.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa (Kelebihan Pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas Ke Bogor tanggal 27 Februari 2023 an Dyah K) dari setoran SSBP sebesar Rp 205.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : FCE9A2CNR23GF1QK tanggal 25 Oktober 2023.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa (Kelebihan Pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas ke bogot tanggal 31 Oktober 2023 an Arga B) dari setoran SSBP sebesar Rp 430.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 784162CPNJFL7I3K tanggal 27 November 2023.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa (Kelebihan Pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas ke Karawang 28 sd 30 November 2023 an Tita) dari setoran SSBP sebesar Rp 3.000.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 6208045KN9G53KRS tanggal 20 Desember 2023.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa (Kelebihan Pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas ke tasikmalaya 12 sd 15 november 2023 an Afdi)

dari setoran SSBP sebesar Rp 18.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : F06CB0JUNV8VR9K0 tanggal 29 Desember 2023.

Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Pengembalian Belanja Dalam Kota (524113)

- Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Kota an bahtiar dari setoran SSBP sebesar Rp280.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 4C0937N8Q0S9V5G8 tanggal 3 Maret 2023.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Kota an Bachtiar dari setoran SSBP sebesar Rp280.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : E1BE62CNR1DVI7EA tanggal 3 Maret 2023.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Kota an Evy Y dari setoran SSBP sebesar Rp210.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 3E9865UFMUNA99OI tanggal 29 Desember 2023.

Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Pengembalian Belanja Paket meting dalam kota (524114)

- Pengembalian Belanja Paket meting dalam kota LS BPP 04 dari setoran SSBP sebesar Rp450.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 8BBA1520AHEDT83R tanggal 13 September 2023.

Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Pengembalian Belanja Paket meting luar kota (524119)

- Pengembalian Belanja Paket meting luar kota ke Bogor tanggal 17 sd 18 Januari 2023 dari setoran SSBP sebesar Rp50.000,00 yang berasal dari pengembalian belanja Perjalanan Biasa nomor NTPN : 9BB238JM9S46ONDJ tanggal 23 Oktober 2023.

B.5 Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp2.157.036.000*

Realisasi Belanja Modal Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.157.036.000,00 dan

Rp3.891.187.601,00 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 Audited dan 2022

Uraian	Realisasi		Naik/ (Turun)
	2023	2022	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,157,036,000	3,891,187,601	(44.57)
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Modal PM terkait COVID 19	-	-	-
Belanja Modal Nilai Aset Tetap Lainnya	-	-	0.00
Realisasi Belanja Bruto	2,157,036,000	3,891,187,601	(44.57)
Pengembalian	-	-	0.00
Realisasi Belanja Netto	2,157,036,000	3,891,187,601	(44.57)

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp2.157.036.000,-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.157.036.000,00 dan Rp3.891.187.601,00

Perbandingan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 Audited dan 2022

Uraian	Realisasi		Naik/ (Turun)
	2023	2022	%
Kendaraan Bermotor Roda-4	590,000,000	531,800,000	-
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	569,381,000	2,164,750,000	-
Perangkat Ruang Rapat	547,700,000	-	-
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	449,975,000	1,194,637,601	0.00
Realisasi Belanja Bruto	2,157,056,000	3,891,187,601	(44.57)
Pengembalian	-	-	0.00
Realisasi Belanja Netto	2,157,056,000	3,891,187,601	(44.57)

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran/TUP

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0,00*

Hasil Pemeriksaan Kas tanggal 29 Desember 2023, Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran dengan nomer Rekening 9890446220981000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor 00442/DRPP/62098/2023 (terlampir) serta sisa UP/TUP telah disetorkan ke Kas Negara maksimal pada 31 Desember 2023, sehingga Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00., dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran/TUP

Keterangan	2023	2022
Rekening Bank	-	-
Uang Tunai	-	-
saldo UP di BPP	-	-
Kuitansi UP yang belum di SPM kan	-	-
saldo TUP di BPP	-	-
Kuitansi TUP yang belum di SPM kan	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,00*

C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Periode 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp0,00 Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas berada dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP melainkan dari LS.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No	Uraian	2023	2022
1	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
3	Kas Lainnya dari Hibah	-	-
	Jumlah	-	-

Piutang PNB
Rp23.878.250,00,-

C.3 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp23.878.250,00 dan Rp97.803.383,00 Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan telah diselesaikan pembayarannya. Piutang lainnya (115212) sebesar Rp23.878.250,00 terhadap Beban Gaji Pokok PNS (511111) sebesar Rp18.593.250,00 dan Beban Tunjangan Fungsional PNS (511124) sebesar Rp5.285.000,00 merupakan koreksi atas temuan BPK. Rincian Piutang lainnya disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB

Uraian	2023	2022
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	23,878,250	97,803,383
Jumlah	23,878,250	97,803,383

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Bukan Pajak
Rp119.391,-

C.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp119,391 dan Rp489.017,00. Penyisihan piutang tidak tertagih - piutang Bukan Pajak merupakan 5/1000 dikalikan Piutang lainnya dari Uang Makan dan Tunjangan Kinerja Bulan Desember

Uraian	2023	2022
	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	119,391	489,017
Jumlah	119,391	489,017

Persediaan
Rp103.441.128,00

C.5. Persediaan

Nilai Persediaan Periode 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp103.441.128,00 dan Rp49.923.148,00, Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual,

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp103.441.128,00.

Rincian Persediaan

Persediaan	2023	2022
Barang Konsumsi	103,441,128	49,923,148
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	103,441,128	49,923,148

Total mutasi tambah persediaan adalah sebesar Rp242.408.647,00 sedangkan total mutasi kurang persediaan selama periode laporan adalah sebesar Rp200.636.451,00 dan saldo awal sebesar Rp49.923.148,00.

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp0,00 yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak dengan nilai sebesar Rp0,00 dan kondisi usang dengan nilai sebesar Rp0,00.

Ringkasan atas Mutasi Persediaan disajikan pada tabel di bawah ini:

Uraian Transaksi	Nilai (Rp)
Saldo Awal, 1 Januari 2023	49,923,148
Mutasi Tambah	242,408,647
M01 Penambahan Saldo Awal	-
M02 Pembelian	242,385,647
M03 Transfer Masuk	-
M06 Perolehan Lainnya	-
M10 Reklas Masuk	-
M13 Transfer Masuk Online	-
M95 Koreksi Transfer Keluar Online	-
M98 Koreksi Nilai Tambah	-
M99 Koreksi Kuantitas Tambah	-
Mutasi Kurang	200,636,451
K01 Habis Pakai	200,636,451
K02 Transfer Keluar	-
K04 Barang Usang	-
K05 Barang Rusak	-
K06 Keluar Lainnya	-
K10 Reklas Keluar	-
K11 Reklasifikasi ke Aset	-
K13 Transfer Keluar Online	-
K98 Koreksi Nilai Kurang	-
K99 Koreksi Kuantitas Kurang	-
KO Penyesuaian Nilai Persediaan	-
P Hasil Opname Fisik	11,745,784
Saldo Akhir, 31 Desember 2023	103,441,128

Mutasi tambah sebesar Rp242.408.647,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pembelian (M01) sebesar Rp242.408.647,00 merupakan transaksi yang berasal dari realisasi akun belanja pembentuk persediaan berupa akun Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811).

Mutasi kurang sebesar Rp200.636.451,00 Habis Pakai (K01) sebesar Rp200.636.451,00 berasal dari pemakaian barang persediaan selama tahun berjalan.

C.6. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp21.801.109.926,00

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin Periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp21.801.109.926,00 dan Rp20.172.275.188,00 Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2022	Rp	20,172,275,188
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	2,157,036,000
Penggunaan Kembali BMN yg sdh dihentikan	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	528,201,262
Transfer Keluar	Rp	-
Koreksi Nilai	Rp	-
Selisih/Ekstrakomtabel	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	21,801,109,926
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	Rp	(16,166,045,872)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp	5,635,064,054

Mutasi tambah berupa :

Penambahan peralatan dan mesin dari pembelian berupa :

No	Peralatan dan Mesin	Nilai
1	Alat Angkut Darat Bermotor	590,000,000
2	Alat Kantor	655,875,000
3	Alat Laboratorium	-
4	Komputer	324,705,000
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	586,456,000
Jumlah		2,157,036,000

- 1) Mutasi tambah Alat Angkutan berasal dari Pembelian (101) Jeep berupa 1 unit merk Honda CRV dengan nilai sebesar Rp590.000.000,00 dari PT. Honda Prospect Motor sesuai dengan SP2D Nomor 231751301016064 tanggal 13 April 2023.
- 2) Mutasi tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga berasal dari Pembelian (101) berupa 141 unit Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan nilai sebesar Rp655.875.000,00 dengan rincian:
 - a) 1 unit merk Tiger/Custom Plywood dengan nilai sebesar Rp6.970.000,00 dari PT. Gading Murni sesuai dengan SP2D Nomor 231751301016032 tanggal 18 April 2023.
 - b) 1 unit Tiger/Custom Plywood dengan nilai sebesar Rp6.035.000,00 dari PT. Gading Murni sesuai dengan SP2D Nomor 231751301016032 tanggal 18 April 2023.
 - c) 1 unit Tiger/Custom Plywood dengan nilai sebesar Rp6.545.000,00 dari PT. Gading Murni sesuai dengan SP2D Nomor 231751301016032 tanggal 18 April 2023.
 - d) 1 unit Tiger/Custom Plywood dengan nilai sebesar Rp6.545.000,00 dari PT. Gading Murni sesuai dengan SP2D Nomor 231751301025742 tanggal 13 September 2023.
 - e) Locker berupa 60 unit merk Tiger/Custom Plywood dengan nilai sebesar Rp210.000.000,00 dari PT. Gading Murni sesuai dengan SP2D Nomor 231751301016032 tanggal 18 April 2023.
 - f) Lemari Kayu berupa 4 unit merk Tiger/Custom Plywood dengan nilai sebesar Rp27.880.000,00 dari PT. Gading Murni sesuai dengan SP2D Nomor 231751301016032 tanggal 18 April 2023.
 - g) Kursi Besi/Metal berupa 73 unit merk Tiger/ST-02WLN dengan nilai sebesar Rp87.600.000,00 dari PT. Gading Murni sesuai dengan SP2D Nomor 231751301025742 tanggal 13 September 2023.
 - h) Locker Tiger/Locker 4 Pintu sebanyak 15 unit total nilai perolehan sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - i) Televisi berupa 2 unit merk Samsung/Smart TV QLED UHD 98QN90A dengan nilai sebesar Rp205.900.000,00 dari PT.

Bhinneka Mentaridimensi sesuai dengan SP2D Nomor 231751301031550 tanggal 17 Juli 2023.

- j) Sofa sebanyak 5 unit berupa 2 unit senilai Rp19.800.000,00 merk HNR Kreasi/Custom Sofa; 1 unit senilai Rp8.200.000,00 merk HNR Kreasi/Custom Sofa; 2 unit senilai Rp17.900.000,00 merk HNR Kreasi/Custom Sofa dari PT. Gading Murni sesuai dengan SP2D Nomor 231751301035919 tanggal 07 Agustus 2023.
- 3) Mutasi tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar berasal dari Pembelian (101) yaitu:
- a) Telephone Mobile berupa 1 unit merk Samsung/Galaxy Z Fold4 Phantom Black dengan nilai Rp22.000.000,00 dari PT. Bhinneka Mentaridimensi sesuai dengan SP2D Nomor 231751301020287 tanggal 23 Mei 2023.
 - b) Video Monitor sebanyak 6 unit berupa 4 unit merk ASUS/ZenScreen MB166C Portable dengan nilai Rp12.876.000,00 dari PT. Bhinneka Mentaridimensi sesuai dengan SP2D Nomor 231751301020287 tanggal 23 Mei 2023 dan 2 unit merk ASUS/ZenScreen MB166C Portable dengan nilai Rp5.880.000,00 dari PT. Bhinneka Mentaridimensi sesuai dengan SP2D Nomor 231751301044457 tanggal 12 Oktober 2023.
 - c) Microphone/Wireless MIC berupa 1 unit merk TOA/Wireless Microphone Conference System dengan nilai Rp545.700.000,00 dari PT. Bhinneka Mentaridimensi sesuai dengan SP2D Nomor 231751301046353 tanggal 25 Oktober 2023.
- 4) Mutasi tambah Komputer berasal dari Pembelian (101) yaitu:
- a) Lap Top sebanyak 14 unit berupa 10 unit merk Axioo/Mybook Pro L7 (16N9) dengan nilai Rp178.500.000,00 dari PT. Bhinneka Mentaridimensi sesuai dengan SP2D Nomor 231751301031550 tanggal 17 Juli 2023 dan 4 unit merk Axioo/Mybook Pro L7 (16N9) dengan nilai Rp71.400.000,00 dari PT. Bhinneka Mentaridimensi sesuai dengan SP2D Nomor 231751301044457 tanggal 12 Oktober 2023.
 - b) Printer (Peralatan Personal Komputer) berupa 15 unit merk Epson/EcoTank L121 dengan nilai Rp37.125.000,00 dari PT.

Bhinneka Mentaridimensi sesuai dengan SP2D Nomor 231751301031550 tanggal 17 Juli 2023.

- c) Personal Komputer Lainnya berupa 2 unit merk Samsung/Galaxy 9+ 5G dengan nilai Rp37.680.000,00 dari PT. Bhinneka Mentaridimensi sesuai dengan SP2D Nomor 231751301044457 tanggal 12 Oktober 2023.

Mutasi Kurang berupa :

Mutasi kurang peralatan dan mesin berupa :

No	Peralatan dan Mesin	Nilai
1	Alat Angkut Darat Bermotor	265.480.250
2	Alat Kantor	262.721.012
3	Alat Laboratorium	-
4	Komputer	-
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	-
Jumlah		528.201.262

- 1) Mutasi kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga berasal dari Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan (911) berdasarkan Persetujuan Penjualan Peralatan dan Mesin pada Inspektorat Jenderal KKP Nomor B.984/ITJ.0/PL.750/VI/2023 tanggal 27 September 2023 berupa 212 unit Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp262.721.012,00 yaitu:
- a) Lemari Besi/Metal berupa 1 unit merk ALBA/Almari Arsip Kaca sebanyak dengan nilai sebesar Rp1.700.000,00.
 - b) Filing Cabinet Besi berupa 1 unit merk Ellite dengan nilai sebesar Rp1.786.000,00; 48 unit merk Alba dengan nilai sebesar Rp56.195.000,00; 46 unit merk Barata dengan nilai sebesar Rp71.116.000,00; 5 unit merk Elite B4-4-0,8 DX dengan nilai sebesar Rp9.515.000,00; 6 unit merk VIP V-304 dengan nilai sebesar Rp15.438.000,00; 2 unit merk Alba FC-114 dengan nilai sebesar Rp4.700.000,00.
 - c) Laci Box berupa 7 unit dengan nilai sebesar Rp5.250.000,00.

- d) White Board berupa 1 unit dengan nilai sebesar Rp1.900.000,00.
 - e) Meja Kayu berupa 5 unit dengan nilai sebesar Rp10.600.000,00.
 - f) Kursi Besi/Metal berupa 8 unit merk ELLITE dengan nilai sebesar Rp7.995.200,00; 5 unit merk ELLITE TYPE EL 802 dengan nilai sebesar Rp7.480.000,00; 54 unit merk Chairman DC-603 dengan nilai sebesar Rp44.321.412,00; 12 unit merk Chairman EC700 dengan nilai sebesar Rp16.724.400,00; 10 unit merk Aristocrat V G (Fabric/Oscar) dengan nilai sebesar Rp8.000.000,00.
- 2) Mutasi kurang Alat Angkut Darat Bermotor berupa berupa 2 (dua) unit Kendaraan Dinas Operasional dengan total nilai perolehan sebesar Rp265.480.250,00 (dua ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian yaitu:
- a) Jeep Honda CRV RD5 2WD 2.4AT sebanyak 1 unit total nilai perolehan sebesar Rp249.835.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
 - b) Sepeda Motor Honda NF 12A1CF MT sebanyak 1 unit total nilai perolehan sebesar Rp15.645.250,00 (lima belas juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

C.7. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp0,00,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya Periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0,00, dan Rp0,00

C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(Rp16.166.045.872.00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing (Rp16.166.045.872,00) dan (Rp14.626.264.322,00) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Periode 31 Desember 2023, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap

disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm.Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	21,801,109,926	16,166,045,872	5,635,064,054
2	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Jumlah	21,801,109,926	16,166,045,872	5,635,064,054

C.9. Aset Tak Berwujud

*Aset Tak Berwujud
Rp0.00.*

Nilai Aset Tak Berwujud (ATB) Periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

C.10. Aset Lain-Lain

*Aset Lain-Lain
Rp0.00,-*

Nilai Aset Lain-Lain Periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.11. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Lainnya

*Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya (Rp0.00,-)*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp0,00) dan (0,00).

C.12. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari KPPN
Rp0,00*

Saldo Uang Muka dari KPPN Periode 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.13. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak
Ketiga Rp0,00*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Periode 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.14. Utang yang belum ditagihkan

*Utang yang belum
ditagihkan Rp0,00*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Periode 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

Ekuitas
Rp5.762.264.041,00,-

C.15 Ekuitas

Ekuitas Periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.762.264.041,00 dan Rp5.693.248.380,00 Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNPB
Rp.0.00*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan PNPB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Pendapatan Rincian Pendapatan periode yang berakhir pada 31
Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	% Naik (TURUN)
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	-	-
Pendapatan Hibah	-	-	-

*Beban Pegawai
Rp33.714.777.788,00*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp33.714.777.788,00 dan Rp33.873.373.622,00 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pegawai di Inspektorat Jenderal periode sampai dengan 31 Desember 2023 berjumlah 205 Orang dengan 554 Jiwa sedangkan Pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berjumlah 6 Orang dengan 11 Jiwa.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai periode yang berakhir pada 31
Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK/ TURUN%
Beban Gaji Pokok PNS	10,395,505,450	10,479,818,820	0.99%
Beban Pembulatan Gaji PNS	146,816	151,842	0.97%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	750,512,150	747,911,634	1.00%
Beban Tunj. Anak PNS	220,141,642	221,770,012	0.99%
Beban Tunj. Struktural PNS	183,730,000	384,650,000	0.48%
Beban Tunj. Fungsional PNS	1,791,780,000	1,481,715,000	1.21%
Beban Tunj. PPh PNS	77,091,971	71,497,743	1.08%
Beban Tunj. Beras PNS	568,931,520	578,563,380	0.98%
Beban Uang Makan PNS	945,514,000	1,150,862,280	0.82%
Beban Tunjangan Umum PNS	99,639,750	128,765,000	0.77%
Beban Gaji Pokok PPPK	57,826,300	-	0.00%
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,540	-	0.00%
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,652,180	-	0.00%
Beban Tunjangan Anak PPPK	211,776	-	0.00%
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	8,680,000	-	0.00%
Beban Tunjangan Beras PPPK	2,245,020	-	0.00%
Beban Uang Makan PPPK	11,371,000	-	0.00%
Beban Uang Lembur	65,895,000	13,094,000	5.03%
Beban Uang Lembur PPPK	1,423,000	-	0.00%
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	18,449,251,098	18,614,573,911	0.99%
Beban PegawaiTunjanganKhusus/Kegiatan/Kine rja PPPK	83,227,575	-	-
JUMLAH	33,714,777,788	33,873,373,622	1.00%

D.3 Beban Persediaan

beban Persediaan
Rp188.867.667,-

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp188.867.667,00 dan Rp164.016.857,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2023 sebesar Rp188.867.667,00 merupakan saldo Awal persediaan pada Neraca Tahun 2022 sebesar Rp49.923.148,00 ditambah Realisasi Belanja Persediaan Komsumsi Pada Laporan Realisasi Belanja Tahun 2023 sebesar Rp242.385.647,00 dikurang Saldo Akhir Persediaan dpada Neraca Tahun 2023 sebesar Rp103.441.128,00. Rincian Beban Persediaan untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Persediaan periode yang berakhir pada 31
Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN)
Beban Persediaan Konsumsi	188,867,667	164,016,857	1.15%
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	188,867,667	164,016,857	1.15%

Beban Barang dan
Jasa
Rp6.454.106.790,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.454.106.790,00 dan Rp6.952.600.282,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa Periode yang Berakhir pada 31
Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	2,054,103,449	1,834,310,837	1.12%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,369,200	4,829,300	0.70%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	388,146,000	399,476,000	0.97%
Beban Barang Operasional Lainnya	1,313,882,009	389,110,000	3.38%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	1,019,776,695	0.00%
Beban Bahan	1,453,197,921	2,364,902,227	0.61%
Beban Honor Output Kegiatan	101,780,000	91,620,000	1.11%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	688,345,000	378,900,000	1.82%
Beban Langganan Telepon	2,270,781	2,097,342	1.08%
Beban Sewa	18,778,850	-	0.00%
Beban Jasa Konsultan	-	29,859,000	0.00%
Beban Jasa Profesi	258,750,000	260,290,000	0.99%
Beban Jasa Lainnya	171,483,580	-	0.00%
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	177,428,881	0.00%
JUMLAH	6,454,106,790	6,952,600,282	0.93%

Beban Pemeliharaan
Rp944.169.983,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp944.169.983,00 dan Rp906.627.280,00. Beban Pemeliharaan terdiri Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar biaya BBM dan Service kendaraan Dinas yang ada di lingkup Inspektorat Jenderal, serta Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa kaca film lantai II Gedung Mina Bahari 3 pada ruangan PHP dan pada lantai V Gedung Mina Bahari II ruang Inspektorat V. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	95,213,750.	27,028,500.	0.00%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	848,956,233.	879,598,780.	0.97%
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Jumlah	944,169,983	906,627,280	1.04%

Beban Perjalanan Dinas
Rp31.857.554.043,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp31.857.554.043,00 dan Rp27.722.561.245,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	27,262,338,358	23,319,868,015	1.17%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,101,687,326	806,144,943	1.37%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	959,613,000	703,026,200	0.00%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,283,050,355	2,893,522,087	0.79%
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	250,865,004	-	0.00%
Jumlah	31,857,554,043	27,722,561,245	1.15%

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp2.067.982.812,00,-

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.067.982.812,00, merupakan nilai dari Penyusutan dan Amortisasi Tahun berjalan sebesar Rp1.539.781.550,00 ditambah nilai dari Penghapusan BMN sebesar Rp528.201.262,00. Beban Penyusutan dan Amortisasi Periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.067.982.812,00 dan Rp1.927.032.528,00. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable asset) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset Tak Terwujud.

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,067,982,812	1,925,707,528	1.07%
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	-	1,325,000	0.00%
Jumlah	2,067,982,812	1,927,032,528	1.07%

Beban Penyisihan
Piutang tidak tertagih
Rp119.391.00,-

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Putang Tidak Tertagih Periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp119.391,00 dan Rp489.017,00. Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih merupakan 5/1000 dari Piutang lainnya.

Surplus dari Kegiatan
Non Operasional
Rp322.752.454,00,-

D.9 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 senilai Rp322.752.454,00 dan 2022 senilai Rp138.574.458,00. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 senilai Rp322.752.454,00 merupakan Pendapatan dari Pelepasan Aset (BMN) senilai Rp322.752.454,00 dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (kelebihan gaji 13 tahun 2022) Rp185.000,00

Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	322,567,454	128,846,000	-
- Pendapatan pelepasan aset non lancar	322,567,454	128,846,000	-
- Beban pelepasan aset non lancar	-	-	0.0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	185,000	9,728,458	(98.1)
- Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	185,000	10,009,533	(98.2)
- Beban dari kegiatan non operasional lainnya	-	281,075	0.0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	322,752,454	138,574,458	132.9

*Pos Pos Luar Biasa
Rp.0*

D.10Pos-Pos Luar Biasa

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp5.693.248.380,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.693.248.380,00 dan Rp3.654.497.343,00.

Defisit LO
(Rp74.904.826.020)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah defisit sebesar (Rp74.904.826.020,00) dan (Rp71.408.126.373,00) Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Koreksi Lain-Lain
Rp489.017,-

E.4 Koreksi lain-lain

Koreksi Lain-Lain merupakan koreksi dari jurnal Beban Penyisihan Piutang tahun lalu. Koreksi Lain-Lain untuk Periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp489.017,00 dan Rp0,00 .

Transaksi Antar
Entitas
Rp74.973.352.664,-

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp74.973.352.664,00 dan Rp73.446.887.410,00

Kenaikan/Penurunan
Ekuitas
Rp69.015.661,-

E.6 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp69.015.661,00 dan Rp2.038.751.037,00.

Ekuitas akhir
Rp5.762.264.041,-

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.762.264.041,00 dan Rp5.693.248.380,00

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 Rekening Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:252/PMK.05/2016 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja. Sesuai surat persetujuan KPPN Jakarta VI tanggal 16 April 2016 Nomor: S-1510/WPB.12/KP.175/2016, Inspektorat Jenderal telah melakukan pembukaan rekening pengeluaran pada Bank BNI Cabang Utama Gambir Jakarta Pusat dengan nomor rekening 243607916 (BPg 175.Inspektorat Jenderal KKP) untuk menampung uang keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran.

F.2 Pengungkapan Lain-lain

I. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal KKP



1. Data Umum Satker

- Nama Satker : Inspektorat Jenderal
- Kode Satker : 032.02.0199.622098.000.KP
- Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Gedung Mina Bahari III Lt. 2,3,4 Jakarta Pusat 10110
- Telepon/Fax : (021) 3520336, Fax (021) 3513206
- Kepala Satker : Tornanda Syaifullah, S.E., M.M., Ak, CSFA

- f. Kuasa Pengguna Anggaran : Tomanda Syaifullah, S.E.,M.M., Ak, CSFA
- g. Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat : Ir. Ivy Silfia Irani, M.Si.
- h. Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat I : Ir. Teuku Nilwan, M.M.
- i. Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat II : Ir. Lutfi, M.M
- j. Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat III : Ir. Wahjudi Poerwanto, M.Ak.
- k. Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat IV : Ir. Lina Herlina, M.M.
- l. Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat V : Teguh Erawan,S.St.Pi

Inspektorat Jenderal KKP melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/PERMEN-KP/2022 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Itjen KKP memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan intern lingkup KKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut Itjen KKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan KKP;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan KKP;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sesuai PermenKP tersebut, struktur Organisasi Itjen KKP terdiri atas enam unit kerja Eselon II, yaitu:

a. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh satuan organisasi lingkup Inspektorat Jenderal KKP.

b. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan administrasi lingkup Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), serta seluruh UPT lingkup BRSDM.

c. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan administrasi lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP), serta seluruh UPT lingkup DJPT dan DJ PSDKP.

d. Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan administrasi lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (DJPB) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL), serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PRL.

e. Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi lingkup Direktorat Jenderal

Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP) dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), serta seluruh UPT lingkup Ditjen PDSPKP dan BKIPM.

f. Inspektorat V

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi lingkup Itjen, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta audit investigasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat di lingkungan KKP.

II. Pejabat Pengelola Anggaran Inspektorat Jenderal KKP

Tahun Anggaran 2023 Inspektorat Jenderal KKP melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan Pejabat Pengelola Anggaran, sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.30/MEN.KP/KU.611/2023 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Pusat di Lingkungan KKP tanggal 20 September 2023.
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.241/MEN.ITJ/KU.510/VI/2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 pada Satuan Kerja Inspektorat Jenderal.
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.01/MEN.ITJ/KU.510/I/2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022 pada Satuan Kerja Inspektorat Jenderal.
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.02/MEN.ITJ/KU.510/I/2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2022 tanggal 2 Januari 2023 pada Satuan

Kerja Inspektorat Jenderal.

5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.02/MEN.ITJ/KU.510/I/2022 Tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran tanggal 05 Januari 2022.
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.03MEN.ITJ/KU.510/I/2022 Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Inspektorat Jenderal tanggal 05 Januari 2022.

Daftar Pengelola Anggaran Satker Inspektorat Jenderal KKP

SATKER	JABATAN	Nama
Inspektorat Jenderal	KPA	Tomanda Saifullah
	PPK Sekretariat Itjen	Ir.Ivy Silfia Irani,M.Si
	PPK Inspektorat I	Ir. Teuku Nilwan, MM
	PPK Inspektorat II	Ir.Lutfi,MM
	PPK Inspektorat III	Ir. Wahjudi Poerwanto,M.Ak
	PPK Inspektorat IV	Ir. Lina Herlina, MM
	PPK Inspektorat V	Teguh Erawan, S.St.Pi
	PPSPM	Dwi Purwanto, S.St.Pi.,M.Tr.A.P
	Bendahara Pengeluaran	Fitma N.P

III. JURNAL

1. Utang yang belum diterima tagihannya (218111) terhadap beban Persediaan Konsumsi (593111) sebesar Rp23.000,00 yang merupakan biaya materai pada persediaan.
2. Piutang lainnya (115212) sebesar Rp23.878.250,00 terhadap Beban Gaji Pokok PNS (511111) sebesar Rp18.593.250,00 dan Beban Tunjangan Fungsional PNS (511124) sebesar Rp5.285.000,00 merupakan koreksi atas temuan BPK
3. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya (116212) terhadap Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Lainnya 594212 sebesar Rp119.391,25 merupakan beban penyisihan piutang tak tertagih.

IV. Tindak Lanjut Temuan BPK

1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI nomor 15b/LHP/XVII/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 atas LK KKP TA 2022. Melakukan Proses Identifikasi, Analisis dan Deklarasi Barang Milik Negara yang memenuhi kriteria Properti Investigasi dalam Hal Ini Inspektorat Jenderal telah membuat Surat kepada Kuasa Pengguna Barang lingkup Inspektorat Jenderal agar memedomani Petunjuk Teknis Akuntansi 09 Akuntansi BMN yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi sebagai panduan pencatatan dan penyajian Properti Investas dengan surat Inspektur Jenderal Nomor R.234/ITJ/HP.520/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK KKP TA 2022 Belum Melakukan Proses Identifikasi, Analisis dan Deklarasi Barang Milik Negara yang memenuhi kriteria Properti Investigasi .
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI nomor 15b/LHP/XVII/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 atas LK KKP TA 2022. Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada empat Satuan Kerja Tidak Tertib dalam Hal Ini Inspektorat Jenderal telah membuat Surat kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran Pembantu lingkup Inspektorat Jenderal agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan surat Inspektur Jenderal Nomor R.230/ITJ/HP.520/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023, R.231/ITJ/HP.520/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023, R.232/ITJ/HP.520/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 dan R.233/ITJ/HP.520/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK KKP TA 2022 Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada empat Satuan Kerja Tidak Tertib.

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
UNIT ORGANISASI : 02
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 622098

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
DKI JAKARTA
INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl. Cetak 29/01/2024 4:01 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akruai_satker--rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	97,803,383	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	489,017
0.0	117111	Barang Konsumsi	49,923,148	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	20,172,275,188	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	14,626,264,322
0.0	391111	Ekuitas	0	5,693,248,380
JUMLAH			20,320,001,719	20,320,001,719

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (02) INSPEKTORAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 07/05/24 12:56 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	23,878,250	97,803,383	(73,925,133)	(75.59)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(119,391)	(489,017)	369,626	(75.59)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	23,758,859	97,314,366	(73,555,507)	(75.59)
Persediaan	103,441,128	49,923,148	53,517,980	107.20
JUMLAH ASET LANCAR	127,199,987	147,237,514	(20,037,527)	(13.61)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	21,801,109,926	20,172,275,188	1,628,834,738	8.07
AKUMULASI PENYUSUTAN	(16,166,045,872)	(14,626,264,322)	(1,539,781,550)	10.53
JUMLAH ASET TETAP	5,635,064,054	5,546,010,866	89,053,188	1.61
JUMLAH ASET	5,762,264,041	5,693,248,380	69,015,661	1.21

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	5,762,264,041	5,693,248,380	69,015,661	1.21
JUMLAH EKUITAS	5,762,264,041	5,693,248,380	69,015,661	1.21
JUMLAH EKUITAS	5,762,264,041	5,693,248,380	69,015,661	1.21
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,762,264,041	5,693,248,380	69,015,661	1.21

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 7 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Inspektur Jenderal


TORNANDA SYAIFULLAH
197202021996031003

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (02) INSPEKTORAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 07/05/24 12:56 PM
Halaman : 1

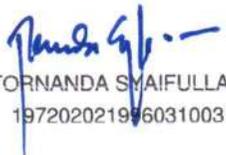
lap_neraca_saiker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	23,878,250	97,803,383	(73,925,133)	(75.59)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(119,391)	(489,017)	369,626	(75.59)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	23,758,859	97,314,366	(73,555,507)	(75.59)
Persediaan	103,441,128	49,923,148	53,517,980	107.20
JUMLAH ASET LANCAR	127,199,987	147,237,514	(20,037,527)	(13.61)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	21,801,109,926	20,172,275,188	1,628,834,738	8.07
AKUMULASI PENYUSUTAN	(16,166,045,872)	(14,626,264,322)	(1,539,781,550)	10.53
JUMLAH ASET TETAP	5,635,064,054	5,546,010,866	89,053,188	1.61
JUMLAH ASET	5,762,264,041	5,693,248,380	69,015,661	1.21

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	5,762,264,041	5,693,248,380	69,015,661	1.21
JUMLAH EKUITAS	5,762,264,041	5,693,248,380	69,015,661	1.21
JUMLAH EKUITAS	5,762,264,041	5,693,248,380	69,015,661	1.21
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,762,264,041	5,693,248,380	69,015,661	1.21

Keterangan :
FINAL

Jakarta, 7 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Inspektur Jenderal


TORNANDA SYAIFULLAH
197202021996031003

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (02) INSPEKTORAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM
Tgl Cetak : 07/05/24 12:56 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	33,714,777,788	33,873,373,622	(158,595,834)	(0.468)
Beban Persediaan	188,867,667	164,016,857	24,850,810	15.151
Beban Barang dan Jasa	6,454,106,790	6,952,600,282	(498,493,492)	(7.17)
Beban Pemeliharaan	944,169,983	906,627,280	37,542,703	4.141
Beban Perjalanan Dinas	31,857,554,043	27,722,561,245	4,134,992,798	14.916
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (02) INSPEKTORAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL

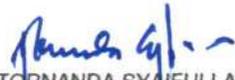
Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM
Tgl Cetak : 07/05/24 12:56 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,067,982,812	1,927,032,528	140,950,284	7.314
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	119,391	489,017	(369,626)	(75.586)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	75,227,578,474	71,546,700,831	3,680,877,643	5.145
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(75,227,578,474)	(71,546,700,831)	(3,680,877,643)	5.145
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	322,567,454	128,846,000	193,721,454	150.351
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	322,567,454	128,846,000	193,721,454	150.351
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	185,000	9,728,458	(9,543,458)	(98.098)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	185,000	10,009,533	(9,824,533)	(98.152)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	281,075	(281,075)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	322,752,454	138,574,458	184,177,996	132.909
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(74,904,826,020)	(71,408,126,373)	(3,496,699,647)	4.897
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(74,904,826,020)	(71,408,126,373)	(3,496,699,647)	4.897

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 7 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Inspektur Jenderal


TORNANDA SYAIFULLAH
197202021996031003

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (02) INSPEKTORAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM
Tgl Cetak : 07/05/24 12:56 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	33,714,777,788	33,873,373,622	(158,595,834)	(0.468)
Beban Persediaan	188,867,667	164,016,857	24,850,810	15.151
Beban Barang dan Jasa	6,454,106,790	6,952,600,282	(498,493,492)	(7.17)
Beban Pemeliharaan	944,169,983	906,627,280	37,542,703	4.141
Beban Perjalanan Dinas	31,857,554,043	27,722,561,245	4,134,992,798	14.916
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (02) INSPEKTORAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL

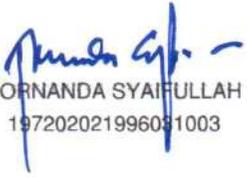
Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM
Tgl Cetak : 07/05/24 12:56 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,067,982,812	1,927,032,528	140,950,284	7.314
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	119,391	489,017	(369,626)	(75.586)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	75,227,578,474	71,546,700,831	3,680,877,643	5.145
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(75,227,578,474)	(71,546,700,831)	(3,680,877,643)	5.145
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	322,567,454	128,846,000	193,721,454	150.351
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	322,567,454	128,846,000	193,721,454	150.351
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	185,000	9,728,458	(9,543,458)	(98.098)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	185,000	10,009,533	(9,824,533)	(98.152)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	281,075	(281,075)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	322,752,454	138,574,458	184,177,996	132.909
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(74,904,826,020)	(71,408,126,373)	(3,496,699,647)	4.897
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(74,904,826,020)	(71,408,126,373)	(3,496,699,647)	4.897

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 7 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Inspektur Jenderal



TORNANDA SYAIFULLAH
197202021996031003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (02) INSPEKTORAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 12:56 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	5,693,248,380	3,654,497,343	2,038,751,037	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(74,904,826,020)	(71,408,126,373)	(3,496,699,647)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	489,017	0	489,017	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	489,017	0	489,017	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	74,973,352,664	73,446,877,410	1,526,475,254	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	69,015,661	2,038,751,037	(1,969,735,376)	-
EKUITAS AKHIR	5,762,264,041	5,693,248,380	69,015,661	-

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 7 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Inspektur Jenderal

TORNANDA SYAIFULLAH
197202021996031003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (02) INSPEKTORAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 12:56 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	5,693,248,380	3,654,497,343	2,038,751,037	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(74,904,826,020)	(71,408,126,373)	(3,496,699,647)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	489,017	0	489,017	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	489,017	0	489,017	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	74,973,352,664	73,446,877,410	1,526,475,254	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	69,015,661	2,038,751,037	(1,969,735,376)	-
EKUITAS AKHIR	5,762,264,041	5,693,248,380	69,015,661	-

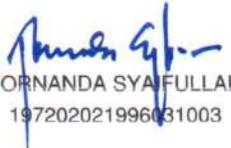
Keterangan :

FINAL

Jakarta, 7 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Inspektur Jenderal


TORNANDA SYAFULLAH
197202021996031003

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : INSPEKTORAT JENDERAL 02
SATUAN KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL 622098

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM
Tgl Cetak : 07/05/24 12:56 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_saiker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah								
I. Pendapatan Perpajakan								
1. Pajak Dalam Negeri								
2. Pajak Perdagangan Internasional								
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak		420,555,837	420,555,837	0		138,586,374	138,586,374	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam								
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan								
3. Pendapatan BLU								
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		420,555,837	420,555,837	0		138,586,374	138,586,374	0
III. Pendapatan Hibah								
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		420,555,837	420,555,837	0		138,586,374	138,586,374	0
B. Belanja Negara								
I. Belanja Pemerintah Pusat	75,666,386,000	75,393,908,501	(272,477,499)	100	73,801,484,000	73,623,936,137	(177,547,863)	100
1. Belanja Pegawai	33,995,348,000	33,738,656,038	(256,691,962)	99	34,012,794,000	33,884,307,837	(128,486,163)	100
2. Belanja Barang	39,513,389,000	39,498,216,463	(15,172,537)	100	35,896,618,000	35,848,440,699	(48,177,301)	100
3. Belanja Modal	2,157,649,000	2,157,036,000	(613,000)	100	3,892,072,000	3,891,187,601	(884,399)	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang				0				0
5. Belanja Subsidi				0				0
6. Belanja Hibah				0				0
7. Belanja Bantuan Sosial				0				0
8. Belanja Lain-lain				0				0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa				0				0
1. Transfer ke Daerah				0				0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : INSPEKTORAT JENDERAL 02
SATUAN KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL 622098

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM
Tgl Cetak : 07/05/24 12:56 PM
Halaman : 2
lap_face_saiker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	75,666,386,000	75,393,908,501	(272,477,499)	100	73,801,484,000	73,623,936,137	(177,547,863)	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 7 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Inspektur Jenderal

TORNANDA SYAIFULLAH
197202021906031003

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : INSPEKTORAT JENDERAL 02
SATUAN KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL 622098

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM
Tgl Cetak : 07/05/24 12:56 PM
Halaman : 2
lap_face_saiker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	75,666,386,000	75,393,908,501	(272,477,499)	100	73,801,484,000	73,623,936,137	(177,547,863)	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL
Jakarta, 7 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Inspektur Jenderal

TORNANDA SYAIFULLAH
TORNANDA SYAIFULLAH
1972020219950031003

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 02
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 622098
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
DKI JAKARTA
INSPEKTORAT JENDERAL

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 07/05/24 1:02 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 7/5/24 7:41 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	10,465,311,000	10,432,651,000	10,417,390,400	3,291,700	10,414,098,700	99.85	18,552,300
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	151,000	148,000	147,136	320	146,816	99.42	1,184
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	748,091,000	760,412,000	750,512,150	0	750,512,150	98.7	9,899,850
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	223,471,000	221,977,000	220,141,642	0	220,141,642	99.17	1,835,358
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	411,150,000	281,350,000	280,750,000	0	183,730,000	99.79	97,620,000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,468,670,000	1,805,480,000	1,802,480,000	5,415,000	1,797,065,000	99.83	8,415,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	72,234,000	77,991,000	77,091,971	0	77,091,971	98.85	899,029
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	579,859,000	569,656,000	568,931,520	0	568,931,520	99.87	724,480
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,061,000,000	1,007,257,000	945,514,000	0	945,514,000	93.87	61,743,000
511129	Belanja Uang Makan PNS	129,585,000	103,710,000	102,785,000	3,145,250	99,639,750	99.11	4,070,250
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	15,159,522,000	15,260,632,000	15,165,743,819	108,872,270	15,056,871,549	99.38	203,760,451
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 511							
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0	58,761,000	57,826,300	0	57,826,300	98.41	934,700
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	2,000	1,540	0	1,540	77	460
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	1,980,000	1,652,180	0	1,652,180	83.44	327,820
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	356,000	211,776	0	211,776	59.49	144,224
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	9,380,000	8,680,000	0	8,680,000	92.54	700,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	2,401,000	2,245,020	0	2,245,020	93.5	155,980
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	16,445,000	11,371,000	0	11,371,000	69.15	5,074,000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	89,325,000	81,987,816	0	81,987,816	91.79	7,337,184
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 516							
5122	Belanja Lembur	0	95,548,000	65,895,000	0	65,895,000	68.97	29,653,000
512211	Belanja Uang Lembur	0	5,000,000	1,423,000	0	1,423,000	28.46	3,577,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	100,548,000	67,318,000	0	67,318,000	66.95	33,230,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122							
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transitio	0	18,460,248,000	18,451,010,528	1,759,430	18,449,251,098	99.95	10,996,902
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	84,595,000	83,227,575	0	83,227,575	98.38	1,367,425
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	18,544,843,000	18,534,238,103	1,759,430	18,532,478,673	99.94	12,364,327
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124							
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51							
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional	2,266,193,000	2,054,438,000	2,054,406,821	303,372	2,054,103,449	100	334,551
521111	Belanja Keperluan Perkantoran							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 02
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 622098
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
DKI JAKARTA
INSPEKTORAT JENDERAL

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 07/05/24 1:02 PM
 Halaman : 2
 Prtg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Date : 7/5/24 7:41 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
		3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
1	2	24,000,000	3,371,000	3,369,200	0	3,369,200	99.95	1,800
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	515,870,000	388,146,000	388,146,000	0	388,146,000	100	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	930,220,000	1,313,927,000	1,313,882,009	0	1,313,882,009	100	44,991
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3,736,283,000	3,759,882,000	3,759,804,030	303,372	3,759,500,658	100	381,342
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211							
5212	Belanja Barang Non Operasional	2,236,180,000	1,456,915,000	1,456,205,821	3,007,900	1,453,197,921	99.95	3,717,079
521211	Belanja Bahan	97,780,000	101,780,000	101,780,000	0	101,780,000	100	0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,150,000,000	688,410,000	688,345,000	0	688,345,000	99.99	65,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,483,960,000	2,247,105,000	2,246,330,821	3,007,900	2,243,322,921	99.97	3,782,079
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212							
5218	Belanja Barang Persediaan	242,500,000	242,500,000	242,385,647	0	242,385,647	99.95	114,353
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	242,500,000	242,500,000	242,385,647	0	242,385,647	99.95	114,353
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218							
5221	Belanja Jasa	7,200,000	2,271,000	2,270,781	0	2,270,781	99.99	219
522112	Belanja Langganan Telepon	0	18,925,000	18,778,850	0	18,778,850	99.23	146,150
522141	Belanja Sawa	541,100,000	259,304,000	259,195,000	445,000	258,750,000	99.96	554,000
522151	Belanja Jasa Profesi	360,000,000	171,625,000	171,483,580	0	171,483,580	99.92	141,420
522191	Belanja Jasa Lainnya	908,300,000	452,125,000	451,728,211	445,000	451,283,211	99.91	841,789
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221							
5231	Belanja Pemeliharaan	129,600,000	95,234,000	95,213,750	0	95,213,750	99.98	20,250
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,051,765,000	848,960,000	848,956,233	0	848,956,233	100	3,767
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,181,365,000	944,194,000	944,169,983	0	944,169,983	100	24,017
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231							
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	32,669,888,000	27,270,028,000	27,263,044,358	6,706,000	27,262,338,358	100	7,689,642
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,937,760,000	1,103,242,000	1,102,457,326	770,000	1,101,687,326	99.93	1,554,674
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,790,020,000	960,204,000	960,063,000	450,000	959,613,000	99.99	591,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,898,520,000	2,283,240,000	2,283,100,355	50,000	2,283,050,355	99.99	189,645
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	38,296,188,000	31,616,714,000	31,614,665,039	7,976,000	31,606,689,039	99.99	10,024,961
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241							
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	0	250,869,000	250,865,004	0	250,865,004	100	3,996
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	250,869,000	250,865,004	0	250,865,004	100	3,996
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242							
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	47,848,596,000	39,513,389,000	39,503,948,735	11,732,272	39,496,216,463	99.99	15,172,537
53	BELANJA MODAL							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGERI/LEMBAGA : 032
ESELON I : 02
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 622098
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
DKI JAKARTA
INSPEKTORAT JENDERAL

Kode Lap : LRA.LB.S.2
Tanggal : 07/05/24 1:02 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 7/5/24 7:41 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,157,649,000	2,157,649,000	2,157,036,000	0	2,157,036,000	99.97	613,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,157,649,000	2,157,649,000	2,157,036,000	0	2,157,036,000	99.97	613,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	2,157,649,000	2,157,649,000	2,157,036,000	0	2,157,036,000	99.97	613,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	85,311,317,000	75,666,386,000	75,516,272,473	122,363,972	75,393,908,501	99.8	272,477,499
	JUMLAH BELANJA							

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 UNIT ORGANISASI : (02) INSPEKTORAT JENDERAL
 WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM
 Tgl Cetak : 07/05/24 12:57 PM
 Halaman : 1
 lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	75,393,908,501
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	420,555,837	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	322,567,454
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	11,119,215
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	86,869,168
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	10,417,390,400	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	147,136	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	750,512,150	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	220,141,642	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	280,750,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,802,480,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	77,091,971	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	568,931,520	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	945,514,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	102,785,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	57,826,300	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,540	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,652,180	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	211,776	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8,680,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,245,020	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	11,371,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	65,895,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1,423,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	18,451,010,528	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	83,227,575	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,054,406,821	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,369,200	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	388,146,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,313,882,009	0
3.0	521211	Belanja Bahan	1,456,205,821	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	101,780,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	688,345,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	242,385,647	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	2,270,781	0
3.0	522141	Belanja Sewa	18,778,850	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	259,195,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	171,483,580	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (02) INSPEKTORAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 12:57 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	95,213,750	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	848,956,233	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,269,044,358	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,102,457,326	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	960,063,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,283,100,355	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	250,865,004	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,157,036,000	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	3,291,700
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	320
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	97,020,000
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	5,415,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	3,145,250
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	1,759,430
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	303,372
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	3,007,900
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	445,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	6,706,000
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	770,000
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	450,000
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	50,000
JUMLAH			75,936,828,310	75,936,828,310

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 7 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Inspektur Jenderal

Tornanda Sya Fullah
TORNANDA SYA FULLAH
197202021996031003

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (02) INSPEKTORAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 12:57 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	75,393,908,501
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	420,555,837	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	322,567,454
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	11,119,215
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	86,869,168
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	10,417,390,400	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	147,136	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	750,512,150	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	220,141,642	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	280,750,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,802,480,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	77,091,971	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	568,931,520	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	945,514,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	102,785,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	57,826,300	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,540	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,652,180	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	211,776	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8,680,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,245,020	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	11,371,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	65,895,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1,423,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	18,451,010,528	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	83,227,575	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,054,406,821	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,369,200	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	388,146,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,313,882,009	0
3.0	521211	Belanja Bahan	1,456,205,821	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	101,780,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	688,345,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	242,385,647	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	2,270,781	0
3.0	522141	Belanja Sewa	18,778,850	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	259,195,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	171,483,580	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (02) INSPEKTORAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 12:57 PM

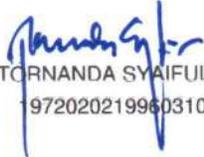
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	95,213,750	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	848,956,233	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,269,044,358	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,102,457,326	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	960,063,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,283,100,355	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	250,865,004	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,157,036,000	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	3,291,700
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	320
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	97,020,000
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	5,415,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	3,145,250
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	1,759,430
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	303,372
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	3,007,900
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	445,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	6,706,000
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	770,000
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	450,000
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	50,000
JUMLAH			75,936,828,310	75,936,828,310

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 7 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Inspektur Jenderal

 TORNANDA SYAIFULLAH
 197202021996031003